

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Teluk atau dalam bahasa Inggris disebut bays atau gulf teluk yang besar seperti Gulf of Mexico dan persian Gulf adalah merupakan jalan keluar ke laut lepas dan biasanya dibahas dalam kaitan dengan Laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu tentang penentuan batas 24 mil laut untuk menentukan perairan teluk yang di pandang sebagai perairan pedalaman. Hal lain yang penting dalam kaitan ini ialah apa yang dinamakan Teluk Historis atau historic bays, yaitu teluk-teluk yang secara historis oleh hukum internasional dipandang sebagai perairan teritorial suatu negara.¹

Masalah yang selalu dipersoalkan dalam hubungan dengan teluk ialah apakah suatu negara berhak untuk melakukan klaim atas seluruh perairan dari teluk sebagai perairan pedalaman dari negara tersebut. Bishop mengemukakan bahwa masalah khusus dapat terjadi dalam kaitan dengan Teluk, yaitu untuk teluk yang mulutnya kurang dari dua kali lebar batas laut teritorial, walaupun ia dapat bertambah lebar, sehingga terdapat titik-titik dari teluk yang lebih besar dari laut teritorial dari jarak manapun di pantai.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/teluk>

Dalam membangun perekonomian nasionalnya, semua negara yang sedang berkembang di Asia mengarahkan perhatiannya pada sumber minyak dan gas bumi di lepas pantai. Sudah banyak negara yang menyatakan lautan dangkal di lepas pantainya sebagai miliknya atau daerah kekuasaannya.² Kawasan perairan Teluk Benggala merupakan kawasan yang memiliki sumber daya minyak dan gas yang cukup melimpah. Karena letak geografis yang saling berdekatan itu, teluk Benggala menjadi kawasan yang memiliki potensi yang konflik yang cukup tinggi hal ini dikarenakan negara Myanmar dan Bangladesh saling berbatasan langsung.

Sebagai negara yang berada di kawasan Teluk Benggala, hubungan Myanmar dan Bangladesh dapat dibilang sangat dekat dan harmonis. Faktor utama kedekatan tersebut adalah karena letak geografis yang dekat antara keduanya. Akan tetapi dengan adanya kedekatan geografis itu justru menjadikan hubungan keduanya rawan terjadi konflik terutama sehubungan dengan wilayah teritorial dan hingga saat ini sengketa teritorial kedua negara itu belum mendapat penyelesaian yang tuntas.

Merupakan sebuah paradoks bahwa konflik teritorial di perbatasan semakin menonjol dan sulit diselesaikan justru setelah Perang Dingin berakhir. Berakhirnya Perang Dingin telah memunculkan konflik-konflik baru bilateral ke permukaan. Bahkan beberapa diantar konflik itu merupakan sisa-sisa Perang dingin dulu.³

² Seri "Ilmu Pengetahuan politik" No. 1 *Masalah Strategi di Samudra Hindia dan Pasifik*, George G. Thomson

³ James Luhur Lima "Berakhirnya Perang Dingin, memunculkan konflik Bilateral di Asia Pasifik" Kompas 20 Juni

Adanya kedekatan geografis dan karena adanya perbedaan-perbedaan obyektif dalam ukurannya, baik dalam artian luas wilayah daratan maupun perairan, jumlah penduduk dan potensi kekayaan alamnya yang demikian menyolok, justru akan menyebabkan dinamika hubungan diantara keduanya sangat tinggi.

Permasalahan di Teluk Benggala ini sebenarnya sudah lama terjadi diantara negara-negara tetangga di wilayah Teluk Benggala, tidak hanya antara Myanmar dan Bangladesh tetapi termasuk juga negara India. Sengketa antara India-Bangladesh di wilayah Teluk Benggala dikenal dengan masalah yang terkait dengan transit dan ekspor gas dari Bangladesh dan masalah India yang mencoba masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif dan mengeksplorasi gas di Teluk Benggala.

Sehubungan dengan kasus Teluk Benggala ini yang mungkin merupakan kelanjutan dari sengketa yang terdahulu, penulis merasa tertarik untuk membahasnya. Berdasarkan dari data-data yang diperoleh dan fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan, penulis berusaha untuk melakukan analisa kasus sengketa Teluk Benggala ini ke dalam bentuk skripsi yang akan menjelaskan tentang dinamika konfliknya sekaligus menganalisa bagaimana bentuk atau upaya penyelesaian yang diambil kedua negara atas sengketa tersebut.

Wilayah perairan di sekitar teluk Benggala memang sudah sejak lama menjadi konflik dan ini bukan sengketa yang pertama yang terjadi antara negara-negara di kawasan perairan Teluk Benggala. Letak geografis yang berdekatan

karena saling berbatasan ditengarai menjadi latar belakang munculnya konflik ini diantara keduanya.⁴ Terjadi klaim tumpang tindih antar kedua negara tersebut dalam menentukan batas-batas wilayah. Berbagai dialog untuk menyelesaikan tidak pernah membuahkan hasil. Dan kini kedua negara sama-sama mengklaim wilayah Teluk Benggala sebagai kedaulatannya.

Sengketa teritorial ini menjadi menarik untuk dijelaskan karena upaya menyelesaikan sengketa dilakukan dengan jalan diplomasi dan tidak perlu menggunakan kekuatan militer. Meskipun Myanmar sendiri memiliki latar belakang pemerintahan militer yang sangat kuat. Hal ini menjadi sangat menarik ketika Myanmar mulai menghentikan eksplorasi minyak dan gas di blok laut dalam di perairan yang disengketakan di teluk Benggala.⁵

Sengketa Teritorial Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh sampai sekarang juga masih belum sampai pada perjanjian akhir resmi yang telah ditandatangani oleh masing-masing negara yang bersengketa. Oleh sebab itulah penulis sangat tertarik untuk menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Sengketa Teluk Benggala Antara Myanmar dan Bangladesh”**

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk menempatkan Studi Analisa Hubungan Internasional sebagai bidang yang menarik dalam ilmu Hubungan Internasional. Suatu penulisan biasanya dilakukan

⁴ [http://Indronet.files.wordpress.com/2007-2009/Konflik Perbatasan](http://Indronet.files.wordpress.com/2007-2009/Konflik%20Perbatasan)

⁵ [http://www.berita.sore.com/Myanmar Menghentikan Eksplorasi gas dan minyak di Teluk Benggala](http://www.berita.sore.com/Myanmar-Menghentikan-Eksplorasi-gas-dan-minyak-di-Teluk-Benggala), 7 November 2008

untuk memberikan gambaran obyektif terhadap fenomena tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan gambaran tentang sengketa yang terjadi antara Myanmar dan Bangladesh khususnya dalam masalah sengketa kepemilikan wilayah teritorial Teluk Benggala.
2. Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa Teluk Benggala antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama proses belajar di perkuliahan.
4. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat manusia, negara dalam melakukan pergaulan maupun transaksi antar negara tidak luput dari perselisihan, sengketa atau konflik, dalam tingkat kecil sampai tingkat serius. Sengketa antar negara merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak

ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, sengketa internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian yang berlainan.⁶

Konflik adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu.

Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan kawasan perairan antara Myanmar dan Bangladesh. Salah satu ketidakseimbangan itu adalah karena belum adanya kesepakatan garis batas landas kontinen antar Myanmar dan Bangladesh di Teluk Benggala sehingga memunculkan sengketa antara Myanmar dan Bangladesh, yaitu Myanmar melakukan eksplorasi minyak dan gas secara sepihak di perairan Teluk Benggala tanpa persetujuan Bangladesh yang juga merasa bahwa Teluk Benggala adalah wilayahnya.

Sengketa antara Myanmar dan Bangladesh dikategorikan sebagai konflik. Konflik merupakan akibat dari pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara

⁶ Burhan Tsani, "Hukum dan Hubungan Internasional" Liberty

A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya.⁷ Bidang masalah yang paling tradisional adalah wilayah teritorial suatu negara. Konflik itu sendiri mencakup tindakan diplomatik, propaganda, perdagangan, atau ancaman dan sanksi-sanksi militer yang dilakukan oleh salah satu negara terhadap negara lainnya. Holsti membagi bidang masalah konflik dalam 7 hal, yaitu:

1. Konflik teritorial terbatas, merupakan pertentangan tuntutan yang berkaitan dengan pemilikan sebidang wilayah khusus, atau hak mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan negara lain.
2. Konflik yang berkaitan dengan komposisi suatu pemerintahan, berkisar dalam pertentangan konsepsi mengenai siapa yang berhak memerintah negara, dalam perselisihan tersebut warna ideologi sangat jelas sekali.
3. Konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara.
4. Konflik karena kehormatan nasional atau prestige, dalam konflik seperti ini pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan perbuatan yang dianggap salah. Keadaan seperti ini dapat memperluas insiden kecil menjadi krisis besar.

⁷ Holsti, K.J. , dalam May Rudy, T., “Studi Strategi Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin”, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 94-95

5. Konflik karena imperialisme tidak terbatas, dalam konflik seperti ini suatu negara berusaha menghancurkan kedaulatan negara lain, biasanya dengan maksud ideologi, keamanan, dan perdagangan.
6. Konflik pembebasan, tampak dalam perang revolusioner yang dilakukan suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, biasanya dilatar belakangi alasan etnis atau ideologi.
7. Konflik yang disebabkan tujuan pemerintah untuk mempersatukan negara yang terpisah.

Dalam kasus sengketa Teluk Benggala konsep yang sesuai adalah kategori konflik teritorial terbatas, yaitu konflik mengenai kepemilikan sebidang wilayah khusus atau hak mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan negara lain.

Hal ini dapat dibuktikan pada hubungan Myanmar dan Bangladesh. Relasi kedua negara Myanmar dan Bangladesh selama ini memang tidak selalu mulus, selalu diwarnai cedera politik dan hukum. Seperti soal perbatasan antar Myanmar dan Bangladesh yang akhir-akhir ini menghangat, dipicu oleh perebutan wilayah yang mempunyai potensi cadangan gas yang cukup besar yakni Teluk Benggala.

Kedua sisi negara yang bertetangga ini saling bersitegang pada bulan Oktober 2008 ketika Dhaka memberikan ijin eksplorasi lepas pantai kepada perusahaan Korea selatan Daewoo, yang mana mendapatkan tantangan keras dari pemerintahan militer Myanmar. Keadaan bertambah panas ketika Myanmar mengirimkan dua kapal perangnya sebagai kapal pengawal ketika kapal-kapal

pengeboran dari perusahaan daewoo mulai mengebor dipantai Benggala dimana Myanmar menganggapnya sebagai block lepas pantainya AD-7.⁸

Blok ini terletak dalam perairan di sepanjang tepi barat Myanmar dan sekitar 93 km barat daya pulau St Martin kepunyaan Myanmar. Pemerintah Dhaka mengajukan protes resmi kepemerintahan Myanmar dan juga kepada Daewoo, serta mengirimkan tiga kapal perangnya kedaerah sengketa, ini menandakan daerah tersebut semakin bertambah tegang karena meminta eksplorasi untuk segera dihentikan.

Kedua negara yang bertetangga ini segera mengerahkan kekuatan militernya diperbatasan, akan tetapi ketegangan ini dengan cepat mereda ketika perusahaan Daewoo pada tanggal 6 Nopember 2008 menghentikan pengeboran lepas pantainya. Menurut pemerintah Myanmar, perlu mengadakan survey didaerah tersebut dengan lebih lengkap dan pengeboran sumur lepas pantai akan diperluas sampai ke blok A-3 lepas pantai ke timur.⁹

Kawasan teluk benggala terus menerus menjadi daerah yang genting semenjak perusahaan Daewoo menemukan adanya cadangan gas yang sangat banyak didaerah blok A-1 Myanmar, tepat pada garis lepas pantai negara bagian Rakhine dekat dengan Siitway dan sebelah timur dari zona perbatasan maritim yang rawan sengketa pada tahun 2003. Daewoo memperkirakan penemuan cadangan gas sebanyak 4-6 trilyun kaki kubik dengan kedalaman yang tidak

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki>

⁹ [http://www.Beritasore.com/Myanmar Menghentikan Eksplorasi Minyak dan gas diTeluk Benggala,](http://www.Beritasore.com/Myanmar%20Menghentikan%20Eksplorasi%20Minyak%20dan%20gas%20diTeluk%20Benggala)

begitu dalam yaitu sekitar 150 meter dan ini memberikan prospek yang sangat menjanjikan dan potensial kelak bisa memberikan hasil sampai 14-20 trilyun kaki kubik.

Oleh kaena itu semenjak tahun 2001, perusahaan Daewoo mengoperasikan kerja sama permanen dengan perusahaan minyak India dan perusahaan gas Alam (ONGC), GAIL serta perusahaan gas India dan Korea. Pada awal tahun 2004, perusahaan Daewoo juga mendapatkan kontrak kerja untuk blok A-3 yang dekat sekali dengan blok A-1 dan selanjutnya juga mendapatkan hak eksploasi untuk blok AD-7 didaerah sebelah barat pada bulan Februari 2007.

Dengan ditemukannya daerah Shwe dengan blok A-1 ini memicu dilakukannya eksplorasi yang baru di Myanmar untuk daerah lepas pantai disebelah baratnya. Selanjutnya perusahaan minyak Cina yakni CNOOK memasuki kawasan Teluk bengala pada tahun 2004; lalu perusahaan ESSAR yang merupakan perusahaan minyak swasta India pada tahun 2005; GAIL mendapatkan hak operasi bebas di daeah ini semenjak tahun 2006; dan dilanjutkan oleh China Natural Gas Petroleum Corpration (CNPC) / Petro China pada tahun 2007; setelah itu Malaysian Rimbuan Petro Gas pada bulan Februaruuai 2007; dan ONGC mendapatkan hak eksplorasi pada tiga blok semenjak September 2007.

Dengan adanya atau setidaknya kemungkinan daerah yang kaya akan minyak serta cadangan gas di daerah perairan yang rawan menyebabkan sulitnya untuk dicapai kesepakatan. Ketegangan itu lebih didorong oleh kecemasan

Myanmar dan Bangladesh untuk keamanan cadangan energi yang dimilikinya, dan tak satupun negara itu menyadari akan potensi bahaya masuknya negara adidaya kedaerah sengketa. Pada tahun 1982, perundingan tentang hukum laut yang diselenggarakan oleh PBB, yang memberikan ijin bagi negara untuk mengajukan klaim untuk zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut atau sekitar 370 kilometer dari bagian pantai dan masalah ini yang menjadikan ketegangan.

Sejauh ini, yang menjadi ketegangan antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh adalah berpusat pada cadangan minyak yang akan dieksploitasi dan bagaimana pembagiannya lalu kedua negara tersebut saling mengirimkan kapal perangnya. Teluk Benggala yang menjadi rebutan antara Bangladesh dan Myanmar akan bisa memberikan penghasilan negara, seperti misalnya Cina dan India berminat akan mempergunakan pipanisasi bahan bakar yang diperlukan sebagaimana diklaim oleh Myanmar untuk pasaran domestiknya.

Beijing menganggap perlunya pemakaian pipanisasi gas sepanjang 2300 kilometer langsung menuju propinsi Yunnan disebelah tenggara. Negara Cina berhasil dalam mengamankan kebutuhan bahan bakarnya serta demi kepentingan ekonomi jangka panjang terhadap Myanmar dan juga dukungan politik serta diplomatik terhadap pemerintahan junta militer Myanmar. Sistem pipanisasi ke Bengala barat India akan memberikan jalur angkutan bahan bakar yang fisien dan hanya memerlukan hak transit melalui Bangladesh yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh.

Ketegangan ini telah berlangsung lama dan diperlukan langkah bertahap dalam mengatasi masalah saling curiga antar bangsa, antara Dhaka dan New delhi untuk ide pembangunan jalur pipa minyak ke India. Perusahaan swasta yang berada di Bangladesh, termasuk Chevron, Shell dan Chairn Energy dan juga perusahaan multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang telah sepakat akan memberikan dana untuk pembangunan pipa minyak bagi kebutuhan ekspor.

Untuk dapat menyelesaikan masalah perbatasan antar Myanmar dan Bangladesh memang dibutuhkan suatu proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Komunikasi antar kedua negara harus tetap dibuka guna mencegah terjadinya konflik yang lebih lanjut. Melalui komunikasi tersebut kedua belah pihak dapat menentukan dan menyepakati bentuk atau upaya penyelesaian yang diinginkan untuk menyelesaikan kemelut yang kini tengah mengganjal hubungan kedua negara. Dan bagaimanapun upaya penyelesaiannya diharapkan tidak mengganggu keharmonisan hubungan kedua negara serta dapat memberikan suatu hasil kesepakatan sekaligus berarti menyelesaikan sengketa atas Teluk Benggala.

D. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan suatu pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu *Bagaimana upaya penyelesaian sengketa Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh?*

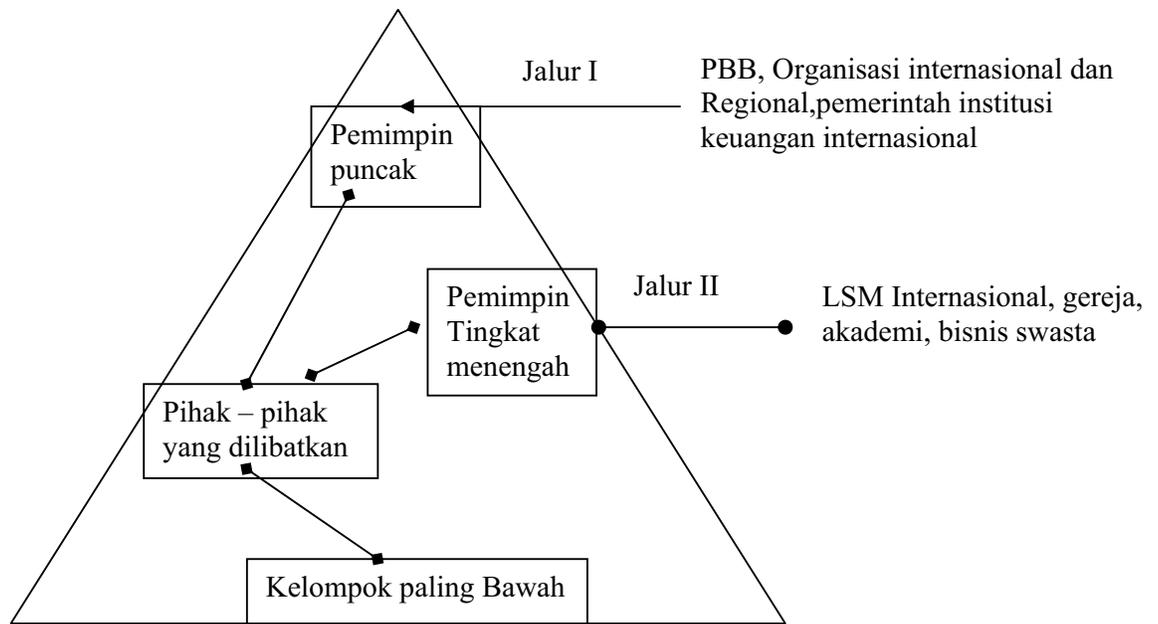
E. Kerangka Teoritis

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok, secara umum terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran, yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu.

Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan dapat diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa perilaku konflik tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikap konflik tidak lagi membahayakan, dan struktur konflik telah diubah.¹⁰ Hugh Miall, et al menawarkan beberapa pendekatan resolusi konflik dan cara penyelesaian konflik secara damai. Salah satu gagasannya tentang penyelesaian konflik yaitu Penyelesaian Konflik Multi jalur¹¹.

¹⁰ BN Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 341

¹¹ Hugh Miall, at. All, Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik: Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000



Gambar 1 Penyelesaian konflik multi jalur

← Jalur I : Negoisasi, menjaga perdamaian, arbitrase, dukungan,

perdamaian, dengan otot (kekuatan). Dominasi kekuatan

yang dipertukarkan dan kekuasaan untuk mengancam.

● — ● Jalur II : Jasa yang baik, konsiliasi, mediasi murni, penyelesaian masalah. Dominasi kekuasaan integrative dan kekuasaan yang dipertukarkan.

◆ — ◆ Jalur III : Konstituensi damai di dalam konflik, membangun kohesi sosial, landasan yang sama. Dominasi kekuasaan integratif dan kekuasaan yang dipertukarkan.

Dalam penyelesaian konflik Teluk Benggala, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik baru melalui jalur I dan II. Hal ini disebabkan konflik teluk Benggala melibatkan konflik antar negara, bukan masyarakat.

Penyelesaian konflik Multi Jalur,

Jalur 1: Penyelesaian Konflik Multi Jalur melalui negosiasi

Negosiasi atau perundingan bilateral antara negara yang bersengketa yaitu Myanmar dan Bangladesh.

Jalur II: Penyelesaian Konflik Multi Jalur melalui mediasi

Mediasi, dengan menunjuk Cina sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara dua negara yaitu Myanmar dan Bangladesh.

Pada jalur I, negoisasi atau perundingan bilateral antara negara yang bersengketa yaitu Myanmar dan Bangladesh. Sedangkan jalur II dilakukan mediasi dengan negara cina. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan dapat dilakukan dengan negoisasi dan melibatkan peran ketiga (mediasi). Tujuan penyelesaian konflik adalah menstranformasikan konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada dan menjadi proses perubahan sosial yang penuh damai (tanpa kekerasan).

- Negoisasi

Negoisasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Esensi dari negoisasi (perundingan) ini adalah untuk kepentingan bersama pihak-pihak yang terkait guna menghindari kekerasan atau jika telah terjadi untuk mengakhirinya. Tanpa kepentingan bersama minimal ini, tidak ada kompromi.

Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung diantara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, atau pada tahap lebih lanjut, ketika kedua pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian damai.

Jalur bilateral yang ditempuh oleh Myanmar dan Bangladesh, misalnya pada perundingan di Dhaka yang dihadiri para pakar dari kedua negara. Dalam perundingan berusaha membahas tentang perbatasan wilayah laut antara Myanmar dan Bangladesh. Dalam perundingan Bangladesh menyerukan Myanmar agar mengendalikan diri dari mengeksplorasi minyak dan gas di daerah sengketa di Teluk Benggala, sampai mereka menandatangani kesepakatan untuk memecahkan masalah itu. Seruan tersebut mengemuka pada awal perundingan “Myanmar hendaknya mengendalikan diri dari melakukan eksplorasi di daerah-daerah sengketa di Teluk Benggala sampai perjanjian akhir antara kedua negara ditandatangani,” kata M.A.K. Mahmood, pemimpin dari pihak Bangladesh, pada pidato pembukaan.¹²

Untuk menyelesaikan persoalan sengketa perbatasan antar kedua negara, harus dilihat kembali rangkaian proses negosiasi antara negara yang berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Teluk Benggala. “Kedua negara yaitu Myanmar dan Bangladesh telah melakukan perundingan-perundingan selama bertahun-tahun untuk mendemarkasi perbatasan mereka di Teluk Benggala, dan pekan ini pihaknya menginginkan penyelesaian diplomatik atas sengketa itu untuk

¹² [http://www.Beritare.com/Myanmar dan Bangladesh Mulai Perundingan Sengketa Laut](http://www.Beritare.com/Myanmar%20dan%20Bangladesh%20Mulai%20Perundingan%20Sengketa%20Laut), 17 november 2008

menghindari konfrontasi. Sebelumnya Menlu Bangladesh Iftekhar Ahmaed Chowdhury mengatakan pemerintahnya akan melakukan segala usaha yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya dan klaim haknya di Teluk Benggala.”¹³

Dalam menyelesaikan sengketa yang kini telah menggajal hubungan bilateral Myanmar dan Bangladesh, upaya diplomasi dengan negosiasi harus dinomorsatukan. Pihak Bangladesh mengatakan pihaknya akan mengirimkan tim diplomatik ke Myanmar untuk berusaha memecahkan sengketa perbatasan, pada saat kapal-kapal kedua pihak berhadapan di lepas pantai perairan yang disengketakan di Teluk Benggala. Sengketa tersebut tidak akan menimbulkan konfrontasi antar dua negara tetangga yang bersahabat, dan harus dipecahkan secepat mungkin melalui diplomasi.

Sementara jalur multilateral dapat dilihat dengan adanya Bangladesh meminta bantuan China untuk mengatasi permasalahan tersebut setelah perundingan antara kedua Negara tidak berhasil mencapai kata sepakat.

- Mediasi

Dalam proses mediasi terdapat adanya campur tangan pihak ketiga, unsur ini melibatkan jenis badan yang (Organisasi Internasional, negara, LSM, individual), untuk menangani kelompok yang berbeda, dan kelompok lainnya yang mempunyai beragam bentuk, daya tahan, dan tujuan.

¹³ Ibid

Mediasi biasanya penting pada sebuah tahapan ketika paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya tidak akan membuat mereka mencapai tujuan.

Fungsi yang paling penting dari mediator adalah untuk memulihkan komunikasi di antar para pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik dan jika perlu memberikan beraneka jasa kepada para pihak yang berkonflik.

Dalam penyelesaian sengketa di Teluk Benggala, Myanmar telah menghentikan semua aktivitas eksplorasi gas dan minyak di wilayah Teluk Benggala yang diperebutkan antara Myanmar dan Bangladesh. Hal itu dilakukan Myanmar satu hari setelah Bangladesh meminta bantuan China untuk mengatasi permasalahan tersebut setelah perundingan di Yangon antara kedua Negara tidak berhasil mencapai kata sepakat. Kedua negara telah mengadakan perundingan selama bertahun-tahun untuk menentukan demarkasi di wilayah Teluk Benggala dan pekan ini Bangladesh mengaku menginginkan adanya solusi diplomatik untuk menghindari konflik di kemudian hari. Sementara itu, kementerian luar negeri China yang diminta Bangladesh untuk menjadi mediator konflik yang terjadi antara kedua negara mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai.¹⁴

Sehubungan dengan konflik Teluk Benggala, bentuk penyelesaian apapun yang disepakati kedua pihak, tentu saja harus mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Karena ini merupakan kasus klaim tumpang tindih suatu

¹⁴ Ibid, hal 4

wilayah laut (teritorial), maka dari itu sumber atau kaidah hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan adalah hukum laut Internasional, diantaranya seperti Konvensi Hukum Laut 1982 atau ketentuan-ketentuan hukum laut lainnya yang mengatur tentang batas wilayah suatu negara dan tentu saja relevan dengan kasus yang terjadi. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat persoalan seperti ini tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas.

F. Hipotesa

Upaya penyelesaian sengketa Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh adalah dengan lebih mengarah pada upaya damai melalui perundingan baik bilateral maupun multilateral dan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian skripsi ini ditekankan sejak bulan November 2008 saat Myanmar mulai melakukan Eksplorasi Minyak dan Gas secara berlebihan di Teluk Benggala. Namun mengingat sengketa ini baru terjadi dan konflik yang muncul belum terlalu meluas secara militer yang akan menimbulkan korban jiwa, maka hal-hal yang akan menjadi latar belakang bagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjadi suatu gambaran selanjutnya sepanjang masih relevan dengan penelitian untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu luas dan memudahkan seleksi data.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data dan

informasi yang dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*) dengan perolehan data sekunder yang bersumber sari majalah, buku-buku, jurnal, surat kabar, website online, dan dokumen pustaka lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi antara lain mengenai alasan pemilihan judul, Apa yang menjadi latar belakang masalah, Tujuan penulisan, Perumusan masalah, Teori yang digunakan, Hipotesa yang diajukan, Jangkauan penelitian, dan Metode pengumpulan data.

BAB II. PROFIL NEGARA YANG BERSENGKETA MYANMAR-BANGLADESH DAN LATAR BELAKANG SENKETA TELUK BENGGALA

Bab ini menjelaskan tentang Profil Myanmar dan Profil Bangladesh serta Latar Belakang Sengketa Teluk Benggala.

BAB III. KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA DAN PERKEBANGAN SENKETA TELUK BENGGALA

Bab ini menjelaskan Kepentingan Negara-negara yang bersengketa terhadap Teluk Benggala, dan Perkembangan Sengketa Teluk Benggala.

BAB IV. UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TELUK BENGGALE

Bab empat ini akan membahas tentang upaya penyelesaian sengketa Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh dengan negosiasi dan mediasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan dari keseluruhan pokok pembahasan diatas.